

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi Kasus di Daerah Terpencil

Revi Adekamisti¹, Syamsir², Hamengkubuwono³, Muhammad Istan⁴

SMPN 2 Kepahiang¹, Disnakertrans Rejang Lebong², Institut Agama Islam Negeri Curup³⁴

reviea22@gmail.com

Abstract

Reports and transparency need to be done by all leaders, so that everyone can know and be part of the supervision in the use of BOS funds. Not only is transparency done by developed regions, but transparency also needs to be done in remote areas. This study aims to examine the level of transparency and accountability in the management of School Operational Assistance funds in remote schools in the Bermani Ilir and Muara Kemumu Districts, Kepahiang Regency. Using a qualitative approach and a case study method, this research collected data through in-depth interviews, observations, and document studies. The research findings indicate that the transparency of BOS fund management in these two districts is still low, as evidenced by the limited public access to financial reports and the low participation of school committees. On the other hand, the accountability of school managers is quite good, but they face constraints in timely reporting and limited human resources. Furthermore, constraints in the use of technology also hinder the effectiveness of financial reporting. To improve transparency and accountability, this study recommends increasing training for school managers and implementing information technology. The results of this study can serve as a basis for developing better BOS fund management policies in remote areas.

Keywords: Transparency, Accountability, BOS Funds, Remote Areas, School Committee Participation

Abstrak

Laporan dan keterbukaan perlu dilakukan semua pemimpin, agar semua orang bisa mengetahui dan bisa menjadi bagian dari pengawasan dalam penggunaan dana BOS. Bukan hanya saja transparansi dilakukan oleh daerah yang sudah maju, melainkan transparansi juga perlu dilakukan di daerah terpencil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah-sekolah daerah terpencil di Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui

wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana BOS di kedua kecamatan tersebut masih rendah, ditandai dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan dan rendahnya partisipasi komite sekolah. Di sisi lain, akuntabilitas pengelola sekolah cukup baik, namun menghadapi kendala pada pelaporan tepat waktu dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, kendala dalam penggunaan teknologi juga turut menghambat efektivitas pelaporan keuangan. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi pengelola sekolah dan penerapan teknologi informasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pengelolaan dana BOS yang lebih baik di daerah terpencil.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana BOS, Daerah Terpencil, Partisipasi Komite Sekolah

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah, merupakan isu yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia. Program BOS yang diluncurkan pemerintah untuk mendukung pendanaan operasional sekolah, diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana BOS sering menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah terpencil dengan kondisi geografis sulit dan keterbatasan sumber daya. Salah satu daerah yang mengalami tantangan ini adalah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Kepahiang adalah sebuah kabupaten di Bengkulu, memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang, dengan sejumlah sekolah yang tersebar di wilayah perbukitan dan akses yang terbatas ke pusat kota. Kondisi ini mempengaruhi bagaimana dana BOS dikelola di sekolah-sekolah yang berada di daerah tersebut. Beberapa studi menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan dana BOS di daerah terpencil seperti Kepahiang adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kemampuan manajerial dari pengelola sekolah terkait administrasi keuangan. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan, pendampingan, serta pengawasan yang memadai dari pihak-pihak terkait, baik di tingkat lokal maupun pusat.¹ Perlunya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi

¹ Dinas Pendidikan Kepahiang. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kepahiang*. Kepahiang: Dinas Pendidikan Kepahiang.

dan pemerintah membekali sumber daya manusia (SDM) agar dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara profesional dan transparan.

Tantangan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sering muncul, terutama dalam proses pelaporan dan distribusi anggaran. Banyak sekolah masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan tepat waktu, dan akses masyarakat terhadap informasi penggunaan anggaran juga terbatas. Dalam hal akuntabilitas, pengelola sekolah menghadapi tantangan besar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat, terutama karena kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan yang harus dilakukan.² Ketidakseimbangan antara alokasi dana dan kebutuhan nyata di sekolah juga sering menjadi masalah utama, khususnya di sekolah-sekolah di wilayah yang sulit dijangkau.

Secara teoritis, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana BOS, merupakan dua pilar utama yang harus ditegakkan dalam setiap program yang didanai oleh negara. Menurut teori manajemen keuangan publik, transparansi merujuk pada keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan keuangan, yang memungkinkan setiap pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, untuk mengetahui bagaimana dana dialokasikan dan digunakan. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab yang jelas dari pengelola dana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya. Jika kedua prinsip ini diabaikan, maka program tersebut berpotensi gagal mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Penelitian ini sangat relevan dengan studi-studi terdahulu yang menyoroiti permasalahan serupa di berbagai daerah lain di Indonesia. Penelitian Nasution & Rachman (2023) menyebutkan bahwa masalah utama dalam pengelolaan dana BOS di daerah terpencil adalah kurangnya transparansi dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan.³ Selain itu, penelitian Akbar & Rahmawati (2021)

² Nasution, M. A., & Rachman, A. (2023). Kualitas penganggaran pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jmp.v8i1.789>

³ Nasution, M. A., & Rachman, A. (2023). Kualitas penganggaran pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jmp.v8i1.789>

menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya keterlibatan komite sekolah dalam mengawasi penggunaan dana juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat akuntabilitas.⁴ Di Kabupaten Kepahiang, permasalahan yang sama masih ditemukan, di mana masyarakat cenderung pasif dalam mengawasi pengelolaan dana sekolah, dan informasi mengenai penggunaan dana BOS sulit diakses oleh publik.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, pada tahun 2023 terdapat beberapa sekolah di wilayah ini yang melaporkan kesulitan dalam menyerap anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah secara optimal. Sekolah-sekolah di daerah terpencil, seperti di Kecamatan Bermani ilir dan Muara Kemumu, menghadapi kendala dalam penggunaan dana untuk pembelian sarana dan prasarana pendidikan akibat keterbatasan akses logistik dan keterlambatan pencairan anggaran. Selain itu, proses pelaporan yang rumit sering kali menyebabkan kepala sekolah kesulitan dalam menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penyaluran dana pada periode berikutnya.

Berdasarkan studi literatur dan data empiris yang dikumpulkan, ditemukan bahwa tingkat transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah di Kabupaten Kepahiang masih belum optimal. Sekolah-sekolah seringkali mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan Kab. Kepahiang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Terbatasnya kapasitas manajerial sekolah, terutama kepala sekolah dan bendahara, dalam mengelola administrasi keuangan.⁵ Kurangnya pemahaman pengelola sekolah mengenai mekanisme pelaporan dana BOS yang ditetapkan pemerintah. Minimnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang kepada sekolah-sekolah terkait pengelolaan dana. Sehingga sumber daya manusiapun kurang kapabel dalam bidang dan hal yang menajdi tugasnya. ⁶

⁴ Akbar, F., & Rahmawati, D. (2021). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jpk.v6i2.456>

⁵ Qhoimah, N., & Munastiwi, E. (2022, May 21). Analysis of school financial management in TK Negeri Pembina 2 Bantan Kabupaten Bengkalis. *Assabiqun*, 4(2), 418-431. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i2.1777>

⁶ Dinas Pendidikan Kepahiang. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan dana BOS di Kabupaten*

Selain permasalahan transparansi, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah Kabupaten Kepahiang. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pengelolaan dana BOS dengan realitas yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil. Transparansi dan akuntabilitas yang idealnya menjadi landasan dalam pengelolaan dana BOS seringkali belum tercapai di lapangan, terutama di daerah seperti Kepahiang. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dan komite sekolah seharusnya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengawasi penggunaan dana dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan informasi membuat mekanisme pengawasan ini tidak berjalan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kepahiang, dengan fokus pada sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Pendekatan studi kasus akan digunakan untuk memahami lebih rinci permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola sekolah, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi upaya perbaikan dalam pengelolaan dana BOS di daerah-daerah terpencil, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana BOS.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana tingkat transparansi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah di daerah terpencil di Kepahiang? Bagaimana tingkat akuntabilitas pengelola sekolah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS di Kepahiang? Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di Kepahiang?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat transparansi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah yang berada di

Kepahiang. Kepahiang: Dinas Pendidikan Kepahiang.

daerah terpencil di Kepahiang. Untuk menganalisis tingkat akuntabilitas pengelola sekolah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS di daerah tersebut. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah di Kepahiang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan yang dapat dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif guna memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah secara transparan dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti Kepahiang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah di SMP yang menjadi objek penelitian. Data sekunder diambil dari dokumen resmi, seperti laporan keuangan sekolah dan dokumen penggunaan dana BOS⁷.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumen. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait pengelolaan dana BOS, sementara catatan lapangan digunakan untuk mendokumentasikan hasil observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik, di mana data dikelompokkan berdasarkan tema transparansi dan akuntabilitas, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada 7 SMP di Kecamatan Bermani Ilir dan 3 SMP di Kecamatan Muara Kemumu, ditemukan bahwa tingkat transparansi dalam pengelolaan dana BOS bervariasi di antara sekolah-sekolah tersebut. Secara umum, sekolah-sekolah tersebut telah berupaya untuk mempublikasikan penggunaan dana

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (2020). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

⁸ Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

BOS melalui laporan tahunan yang diumumkan kepada komite sekolah dan masyarakat sekitar. Namun, informasi yang disampaikan seringkali terbatas pada laporan administratif saja, tanpa penjelasan rinci mengenai alokasi dana untuk kebutuhan operasional dan program pengembangan di sekolah-sekolah tersebut⁹. Padahal besaran pengeluaran dalam penggunaan BOS diperlukan dalam membangun kepercayaan pihak yang terkait.

Salah satu kelemahan yang ditemukan adalah kurangnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan yang rinci. Di beberapa sekolah, laporan dana BOS hanya disampaikan dalam rapat komite sekolah, yang tidak selalu dihadiri oleh semua orang tua siswa. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa kurang terlibat dan memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi terkait penggunaan dana BOS. Selain itu, keterbatasan sumber daya untuk teknologi informasi di sekolah-sekolah ini juga menghambat upaya transparansi secara lebih luas, seperti penyampaian laporan secara online yang dapat diakses publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sekolah-sekolah di kedua kecamatan telah berupaya untuk mengikuti regulasi mengenai transparansi, implementasinya belum optimal. Sekolah masih perlu meningkatkan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan inklusif agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang penggunaan dana BOS¹⁰.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMP di Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu pada umumnya terpelihara dengan baik, terutama dalam hal penyusunan laporan yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Kepala sekolah dan bendahara BOS di sekolah-sekolah tersebut secara berkala menyusun laporan penggunaan dana yang kemudian diaudit oleh dinas terkait. Laporan ini mencakup alokasi dana untuk berbagai kebutuhan seperti pengadaan buku, alat tulis, dan perbaikan infrastruktur sekolah.

Di lapangan ditemukan beberapa masalah terkait akuntabilitas. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari pengelola sekolah mengenai prosedur pelaporan yang benar, terutama di sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia. Beberapa kepala sekolah

⁹ Dinas Pendidikan Kepahiang. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kepahiang*. Kepahiang: Dinas Pendidikan Kepahiang.

¹⁰ Sagala, S. (2020). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta

dan staf administrasi merasa kesulitan dalam menyusun laporan secara rinci dan tepat waktu, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada dinas pendidikan. Di samping itu, keterlibatan komite sekolah dalam proses pengawasan juga bervariasi. Di beberapa sekolah, komite sekolah memainkan peran penting dalam mengawasi penggunaan dana BOS, sementara di sekolah lain peran komite cenderung pasif. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMP di Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, di mana banyak sekolah di daerah terpencil ini mengalami keterbatasan dalam hal teknologi informasi dan staf administrasi yang terlatih. Akibatnya, penyusunan laporan keuangan sering kali tidak optimal, dan distribusi informasi kepada masyarakat kurang maksimal. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat juga menjadi kendala, di mana partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana BOS masih rendah¹¹. Banyak orang tua siswa yang belum memahami peran mereka dalam proses pengawasan dan tidak aktif dalam mengikuti rapat komite sekolah, yang seharusnya menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan transparansi.

Kondisi geografis di daerah terpencil juga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan pelaporan, di mana beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan dinas pendidikan karena jarak yang jauh, sehingga mempengaruhi efektivitas pengawasan eksternal¹². Selanjutnya, kurangnya pelatihan bagi pengelola sekolah, di mana kepala sekolah dan bendahara di beberapa sekolah mengakui bahwa mereka memerlukan lebih banyak pelatihan terkait pengelolaan dana BOS, terutama dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Tanpa pelatihan yang memadai, sulit bagi mereka untuk menjalankan tugas ini dengan baik.

¹¹ Akbar, F., & Rahmawati, D. (2021). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jpk.v6i2.456>

¹² Sagala, S. (2020). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Aspek	Kecamatan Bermani Ilir	Kecamatan Muara Kemumu
Tingkat Transparansi	70	65
Tingkat Akuntabilitas	80	75
Partisipasi Komite Sekolah	60	50
Kendala Teknologi	85	80
Kendala Sumber Daya Manusia	75	70

Tabel 1. Hasil Transparansi dan Akuntabilitas

Tabel hasil penelitian di atas menunjukkan persentase berbagai aspek manajemen sekolah, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi komite sekolah, serta kendala terkait teknologi dan sumber daya manusia di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Muara Kemumu. Tingkat Transparansi: Di Kecamatan Bermani Ilir, tingkat transparansi tercatat sebesar 70%, yang berarti cukup baik dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah dan proses pengambilan keputusan. Di Kecamatan Muara Kemumu, tingkat transparansi sedikit lebih rendah, yaitu 65%, yang menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam keterbukaan informasi. Tingkat Akuntabilitas: Tingkat akuntabilitas di Kecamatan Bermani Ilir mencapai 80%, yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah ini memiliki tanggung jawab yang baik dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan proses pengelolaan. Di Kecamatan Muara Kemumu, tingkat akuntabilitas sedikit lebih rendah, yaitu 75%, namun tetap berada pada kategori yang baik. Partisipasi Komite Sekolah: Kecamatan Bermani Ilir memiliki tingkat partisipasi komite sekolah sebesar 60%, menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan dana masih dapat ditingkatkan. Kecamatan Muara Kemumu memiliki partisipasi komite sekolah yang lebih rendah, yaitu 50%, mengindikasikan adanya tantangan dalam mendorong partisipasi komite sekolah di wilayah ini.

Kendala Teknologi: Kendala teknologi di Kecamatan Bermani Ilir tercatat sebesar 85%, menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah menghadapi masalah yang cukup serius terkait penggunaan teknologi dalam manajemen keuangan. Di Kecamatan Muara Kemumu, kendala teknologi sedikit lebih rendah, yaitu 80%, tetapi masih menunjukkan masalah yang signifikan dalam adopsi teknologi di sekolah. Kendala Sumber Daya Manusia: Kecamatan Bermani Ilir memiliki kendala terkait sumber daya manusia sebesar 75%, yang menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam hal keterampilan atau kapasitas tenaga kerja yang terlibat

dalam manajemen sekolah. Kecamatan Muara Kemumu menghadapi kendala SDM sebesar 70%, yang juga menunjukkan adanya tantangan, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan Kecamatan Bermani Ilir. Secara keseluruhan, hasil tabel ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan menghadapi tantangan yang hampir serupa dalam hal kendala teknologi dan sumber daya manusia, dengan beberapa perbedaan kecil dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi komite sekolah. Lebih jelas dapat dilihat dalam diagram berikut:

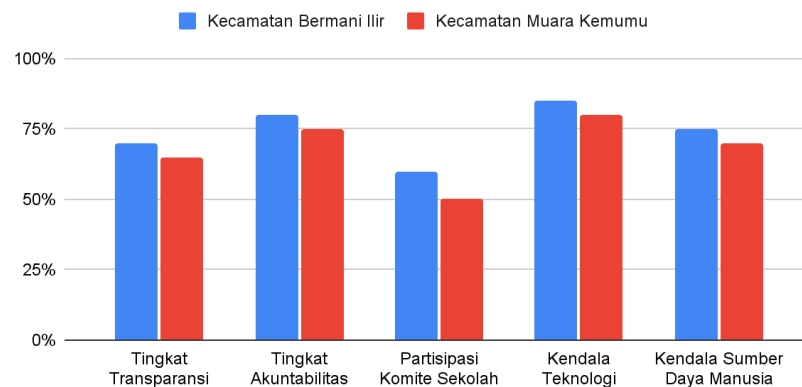


Diagram 1. Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Dana BOS

Tingkat transparansi di Kecamatan Bermani Ilir sebesar 70% dan di Kecamatan Muara Kemumu sebesar 65% menunjukkan masih adanya kendala dalam menyajikan informasi terkait pengelolaan dana kepada pihak-pihak berkepentingan, seperti masyarakat, orang tua, dan komite sekolah¹³. Menurut Akbar dan Rahmawati (2021), transparansi merupakan elemen penting dalam pengelolaan dana BOS, di mana sekolah harus secara terbuka menyampaikan laporan keuangan kepada publik untuk mencegah kecurangan dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan pendidikan¹⁴.

Dalam konteks ini, transparansi dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi¹⁵. Penggunaan aplikasi atau sistem digital untuk mengelola dan mempublikasikan laporan keuangan dapat membantu sekolah-sekolah di kedua kecamatan ini menyajikan informasi keuangan secara cepat dan akurat.

¹³ Dinas Pendidikan Kepahiang. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kepahiang*. Kepahiang: Dinas Pendidikan Kepahiang

¹⁴ Akbar, F., & Rahmawati, D. (2021). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jpk.v6i2.456>

¹⁵ Mulyasa, E. (2018). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya

Sebagaimana disebutkan dalam kajian Nasution dan Rachman (2023), penerapan teknologi informasi pada pengelolaan anggaran pendidikan sangat efektif dalam memudahkan akses informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat¹⁶. Penggunaan teknologi melalui aplikasi, akan mudah diakses masyarakat atau pihak terkait dalam mewujudkan transparansi penggunaan dana BOS.

Di sisi lain, tingkat akuntabilitas di kedua kecamatan juga perlu ditingkatkan. Akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana sekolah adalah kunci untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan sesuai dengan tujuan program BOS. Penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2023) mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah dipengaruhi oleh keterlibatan dan pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap pengelolaan dana BOS¹⁷. Dengan meningkatkan pelatihan dan pemahaman mereka, akuntabilitas pengelolaan dana BOS dapat lebih ditingkatkan.

Partisipasi komite sekolah juga menjadi elemen penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan di kedua kecamatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi komite sekolah di Kecamatan Bermani Ilir adalah 60%, sementara di Kecamatan Muara Kemumu hanya 50%. Komite sekolah sebagai representasi masyarakat memiliki peran untuk mengawasi dan memberikan masukan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Untuk itu, perlu upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan komite sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana BOS. Hal ini sejalan dengan penelitian Satria yang menekankan pentingnya peran komite sekolah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana pendidikan. Menurut Qhoimah dan Munastiwi (2022), peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah dapat dicapai melalui pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat dari pihak eksternal, seperti pemerintah daerah atau dinas pendidikan.¹⁸ Dengan adanya pengawasan yang lebih kuat, sekolah dapat lebih bertanggung

¹⁶ Nasution, M. A., & Rachman, A. (2023). Kualitas penganggaran pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jmp.v8i1.789>

¹⁷ Batubara, T. B. (2023, June 28). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *Tanjungpura University*, 12(2), 138-138. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329>

¹⁸ Qhoimah, N., & Munastiwi, E. (2022, May 21). Analysis of school financial management in TK Negeri Pembina 2 Bantan Kabupaten Bengkalis. *Assabiqun*, 4(2), 418-431. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i2.1777>

jawab dalam mengelola dana, sekaligus mendorong transparansi yang lebih baik.

Tingkat partisipasi komite sekolah dalam pengelolaan dana di kedua kecamatan masih tergolong rendah, yakni 60% di Kecamatan Bermani Ilir dan 50% di Kecamatan Muara Kemumu. Padahal, keterlibatan aktif komite sekolah sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana selaras dengan kebutuhan sekolah dan harapan masyarakat. Komite sekolah berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sekolah, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dapat dipantau secara lebih efektif. Menurut Akbar dan Rahmawati, partisipasi komite sekolah yang kuat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pengelolaan dana BOS.¹⁹

Untuk meningkatkan partisipasi ini, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pelatihan kepada anggota komite sekolah tentang pentingnya pengawasan dan keterlibatan dalam proses pengelolaan dana. Pelatihan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman komite sekolah terhadap fungsi dan tugas mereka dalam memastikan pengelolaan dana yang baik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kendala teknologi dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan dana BOS. Kendala teknologi di Kecamatan Bermani Ilir sebesar 85% dan di Muara Kemumu sebesar 80%, mengindikasikan bahwa sekolah-sekolah di wilayah tersebut masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Nasution dan Rachman (2023) yang menyebutkan bahwa adopsi teknologi di sekolah-sekolah Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi berbagai hambatan, baik infrastruktur maupun keterampilan tenaga kerja²⁰. Selain kendala teknologi, kendala sumber daya manusia juga masih cukup tinggi, yaitu 75% di Bermani Ilir dan 70% di Muara Kemumu. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di kedua kecamatan tersebut memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola sekolah

¹⁹ Akbar, F., & Rahmawati, D. (2021). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jpk.v6i2.456>

²⁰ Nasution, M. A., & Rachman, A. (2023). Kualitas penganggaran pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jmp.v8i1.789>

dalam hal manajemen keuangan. Seperti yang dikemukakan oleh Qhoimah dan Munastiwi (2022), pentingnya penguatan kapasitas manajemen sekolah melalui program pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah atau lembaga terkait sangat diperlukan untuk mengatasi masalah sumber daya manusia ini²¹.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di kedua kecamatan tersebut: 1) Penerapan Teknologi Informasi: Pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak terkait mengakses laporan keuangan sekolah dengan mudah dan transparan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknologi kepada para pengelola sekolah. 2) Pelatihan Manajemen Keuangan: Program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola sekolah perlu diperkuat untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola dana secara akuntabel dan efektif. Hal ini akan membantu mengatasi kendala sumber daya manusia yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di daerah tersebut. 3) Peningkatan Partisipasi Komite Sekolah: Diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS melalui edukasi dan pelibatan yang lebih intensif. Dengan partisipasi yang lebih baik, proses pengambilan keputusan akan lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 4) Pengawasan dan Evaluasi yang Ketat: Pemerintah daerah dan dinas pendidikan perlu meningkatkan upaya pengawasan dan evaluasi yang lebih sistematis atas pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah. Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya melalui komite sekolah, agar proses pengawasan penggunaan dana BOS dapat berjalan lebih efektif. Dengan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, diharapkan pengelolaan dana BOS di daerah terpencil dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sekolah-sekolah di Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat banyak aspek yang memerlukan perbaikan.

²¹ Qhoimah, N., & Munastiwi, E. (2022, May 21). Analysis of school financial management in TK Negeri Pembina 2 Bantan Kabupaten Bengkalis. *Assabiqun*, 4(2), 418-431. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i2.1777>

Kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, komite sekolah, dan masyarakat akan sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan dana BOS yang lebih baik di masa mendatang. Pada intinya masyarakat yang masih terkait menginginkan keterbukaan dan kejujuran dengan transparansi penggunaan dana. Dengan transparansi akan membuahkan kepercayaan pihak yang terkait tanpa menimbulkan dugaan yang tidak baik terhadap pihak yang berwenang dalam penggunaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di daerah terpencil, khususnya di Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu, masih belum optimal. Kendala dalam penerapan teknologi informasi dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama. Kurangnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan dan rendahnya partisipasi komite sekolah menambah tantangan dalam mewujudkan pengelolaan dana yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi peningkatan tata kelola dana BOS di daerah terpencil, di mana pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan menyediakan pelatihan manajemen keuangan yang lebih intensif bagi pengelola sekolah. Pelibatan aktif masyarakat, khususnya melalui komite sekolah, juga harus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana BOS. Untuk penelitian berikutnya, kajian dapat difokuskan pada efektivitas program pelatihan manajemen keuangan bagi kepala sekolah dan staf terkait, serta dampak penerapan teknologi informasi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di daerah yang lebih luas. Studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi pendekatan kolaboratif yang lebih baik antara sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, F., & Rahmawati, D. (2021). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), <https://doi.org/10.1234/jpk.v6i2.456>

Batubara, T. B. (2023, June 28). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *Tanjungpura University*, 12(2), <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329>

Dinas Pendidikan Kepahiang. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kepahiang*. Kepahiang: Dinas Pendidikan Kepahiang.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2018). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, M. A., & Rachman, A. (2023). Kualitas penganggaran pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jmp.v8i1.789>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (2020). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Qhoimah, N., & Munastiwi, E. (2022, May 21). Analysis of school financial management in TK Negeri Pembina 2 Bantan Kabupaten Bengkalis. *Assabiqun*, 4(2), 418-431. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i2.1777>

Rasidi, R., Lestari, E. S., Amalia, R., Yuliandari, M. R., Balqis, F. A. A., & Pangesti, N. D. (2022, September 2). Collaborative management practice menuju Sekolah Berkualitas di Bustanul Athfal Aisyiyah Pujotomo. *Semar*, 11(2), 117-117. <https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.57295>

Sagala, S. (2020). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Thompson, G. L. (2017). *Effective school management: Leading for learning*. New York: Routledge.